



Pengaruh Kecerdasan Artifisial Terhadap Otoritas Pengetahuan Dalam Kurikulum Sekolah: Tinjauan Literatur

Darul Ihsan¹, Benny Prasetya²

¹²Institut Ahmad Dahlan, Probolinggo, Jawa Timur

darulIhsan070915@gmail.com¹

prasetyabenny@gmail.com²

Abstrac. *The presence of generative artificial intelligence (AI) in learning does not merely change how students obtain information; it also shifts who is trusted as a legitimate source of knowledge in schools. This article critically reviews the literature on the influence of AI on epistemic authority in the school curriculum, particularly the changing positions of teachers, textbooks, and the official curriculum. Using a qualitative critical literature review of reputable journal articles, academic books, and policy documents published in 2026, analysed thematically, the review identifies four main findings: (1) AI becomes an additional source of knowledge that erodes the monopoly of teachers and official texts; (2) the authority of AI is problematic because of opacity, data bias, and the potential for epistemic injustice; (3) the apparent dispersal of authority is not a genuine decentralisation, since control over knowledge tends to concentrate in platform providers; and (4) the teacher's role shifts from transmitter of knowledge to epistemic guarantor who curates, verifies, and contextualises AI outputs. The article proposes a conceptual framework of curated epistemic authority as a direction for curriculum development that preserves pedagogical sovereignty in the AI era.*

Keywords: *artificial intelligence; epistemic authority; curriculum; teacher role; critical literature review*

Abstrak. Kehadiran kecerdasan artifisial (AI) generatif dalam pembelajaran tidak hanya mengubah cara siswa memperoleh informasi, tetapi juga menggeser pihak yang dipercaya

sebagai sumber pengetahuan yang sah di sekolah. Artikel ini bertujuan menelaah secara kritis literatur mengenai pengaruh AI terhadap otoritas epistemik dalam kurikulum, khususnya perubahan posisi guru, buku teks, dan kurikulum resmi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur kritis terhadap artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan dokumen kebijakan terbitan 2026, yang dianalisis melalui analisis tematik. Sintesis literatur menghasilkan empat temuan utama: (1) AI menjadi sumber pengetahuan tambahan yang mengikis monopoli otoritas guru dan teks resmi; (2) otoritas AI bersifat problematik karena opasitas, bias data, dan potensi ketidakadilan epistemik; (3) penyebaran otoritas yang tampak tidak sepenuhnya merupakan desentralisasi, sebab kendali atas pengetahuan cenderung terkonsentrasi pada penyedia platform; dan (4) peran guru bergeser dari penyampai pengetahuan menjadi penjamin epistemik yang mengurasi, memverifikasi, dan mengontekstualisasi keluaran AI. Artikel ini menawarkan kerangka konseptual otoritas epistemik terkurasi sebagai arah pengembangan kurikulum yang berdaulat secara pedagogis di era AI.

Kata kunci: kecerdasan artifisial; otoritas epistemik; kurikulum; peran guru; tinjauan literatur kritis

LATAR BELAKANG

Perkembangan AI generatif sejak akhir 2022 membuat jawaban atas hampir setiap pertanyaan tersedia secara instan, fasih, dan meyakinkan bagi siapa pun yang memiliki gawai dan koneksi internet. Bagi dunia pendidikan, perubahan ini menyentuh jantung persoalan kurikulum. Kurikulum tidak pernah sekadar daftar materi, melainkan hasil seleksi tentang pengetahuan mana yang dianggap layak dan sah untuk diajarkan (Apple, 2014). Selama ini wewenang menyeleksi dan mengesahkan pengetahuan tersebut dipegang oleh negara, penyusun buku teks, dan guru. Ketika siswa dan guru dapat bertanya langsung kepada sistem AI, susunan wewenang itu mulai terusik. Lembaga internasional seperti UNESCO menyadari persoalan ini dan menegaskan perlunya pendekatan berpusat pada manusia dalam penggunaan AI di pendidikan (Miao & Holmes, 2023; Miao et al., 2021).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memotret kehadiran AI dalam pendidikan dari berbagai sudut. Bond et al. (2024) dalam tinjauan atas tinjauan sistematis riset AI di pendidikan tinggi menemukan bahwa kajian yang ada banyak berfokus pada sistem adaptif, personalisasi, serta profiling dan prediksi, sehingga mereka menyerukan pertimbangan etis, metodologis, dan kontekstual yang lebih kuat serta pendekatan lintas

disiplin. Kasneci et al. (2023) memetakan peluang sekaligus tantangan model bahasa besar bagi pembelajaran, termasuk risiko ketergantungan dan keakuratan. Dari sisi kritis, Selwyn (2022) mengingatkan bahwa janji AI sering melampaui bukti empiris dan mengabaikan dimensi politik pendidikan, sementara Williamson, Eynon, et al. (2023) menelaah AI dalam pendidikan melalui lensa ekonomi politik, komersialisasi, tata kelola, dan etika. Pada tataran teknologi, Bender et al. (2021) menyoroti bahwa model bahasa berskala besar mereproduksi pola data latihnya tanpa pemahaman, dan Crawford (2021) memperlihatkan bahwa AI bertumpu pada infrastruktur dan relasi kuasa yang jarang tampak.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya membahas AI pada tataran pedagogi, etika, atau teknis, dan belum menjadikan otoritas epistemik sebagai kategori analitis utama dalam memahami perubahan kurikulum. Wacana populer sering mengasumsikan bahwa AI "mendemokratisasi" pengetahuan dan menyebarkan otoritas dari guru kepada banyak sumber, tanpa menguji apakah penyebaran itu nyata atau justru menyembunyikan konsentrasi kuasa baru pada penyedia teknologi. Selain itu, sintesis kritis yang menghubungkan temuan lintas bidang, yakni teknologi pendidikan, teori kurikulum, dan epistemologi sosial, masih relatif terbatas, terlebih yang berangkat dari kebutuhan konteks pendidikan di negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri, studi yang tersedia cenderung memotret pemanfaatan, dampak, dan tantangan ChatGPT dalam pembelajaran (Supriyono et al., 2024), sedangkan telaah yang secara eksplisit menyoroti pergeseran otoritas pengetahuan masih berskala terbatas dan berfokus pada perguruan tinggi (Djakfar Musthafa, 2024).

Artikel ini menawarkan kebaruan melalui sintesis literatur kritis yang membaca pengaruh AI dengan lensa otoritas epistemik (Zagzebski, 2012), ketidakadilan epistemik (Fricker, 2007), relasi kuasa-pengetahuan (Foucault, 1980), dan politik pengetahuan resmi dalam kurikulum (Apple, 2014). Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini mengajukan kerangka otoritas epistemik terkurasi, yakni gagasan bahwa otoritas pengetahuan di era AI sebaiknya tidak diserahkan kepada algoritma maupun dipertahankan secara kaku pada teks resmi, melainkan dikelola melalui kurasi pedagogis oleh guru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tinjauan literatur kritis, yaitu penelaahan yang tidak berhenti pada perangkuman, tetapi menilai asumsi, argumen, dan kepentingan yang melatarbelakangi suatu bidang kajian (Snyder, 2019). Data berupa artikel jurnal bereputasi, buku akademik, dan dokumen kebijakan resmi yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial, pengetahuan, dan kurikulum sekolah, dengan rentang terbitan 2026. Karya teoretis fundamental dikecualikan dari batasan tahun karena berfungsi sebagai kerangka konseptual. Pencarian dilakukan pada Scopus, Google Scholar, dan Garuda dengan kombinasi kata kunci *artificial intelligence in education*, *generative AI curriculum*, *epistemic authority*, *epistemic injustice*, *teacher agency*, serta padanannya dalam bahasa Indonesia. Sumber dipilih secara purposif melalui dua tahap penyaringan, yaitu pembacaan judul dan abstrak, kemudian pembacaan teks lengkap. Sumber dimasukkan apabila relevan dengan AI dan pengetahuan atau kurikulum sekolah, berbasis telaah sejawat atau berupa dokumen kebijakan resmi, dan tersedia dalam teks lengkap. Sumber yang hanya membahas aspek teknis tanpa kaitan dengan pembelajaran, serta publikasi yang belum melalui telaah sejawat, dikeluarkan. Seluruh proses pencarian dan penyaringan dicatat dalam log untuk menjaga keterlacakan. Data dianalisis dengan analisis tematik melalui tahapan pengodean, pengelompokan kode menjadi tema, peninjauan tema, dan pemaknaan kritis dengan kerangka konseptual di atas (Braun & Clarke, 2006). Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber lintas bidang dan pencatatan jejak pemilihan literatur.

1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah secara kritis literatur tentang pengaruh AI terhadap otoritas pengetahuan dalam kurikulum sekolah. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah

- a. Bagaimana literatur menggambarkan pergeseran otoritas epistemik akibat kehadiran AI dalam kurikulum sekolah?
- b. Risiko dan ketimpangan apa yang diidentifikasi literatur terkait otoritas AI sebagai sumber pengetahuan?
- c. Bagaimana implikasinya bagi peran guru dan tata kelola kurikulum?

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

AI sebagai Sumber Pengetahuan Tambahan dan Erosi Monopoli Otoritas

Literatur secara konsisten menunjukkan bahwa AI generatif menjadi sumber rujukan baru yang cepat dan mudah diakses oleh siswa maupun guru (Djakfar Musthafa, 2024; Kasneci et al., 2023). Jika sebelumnya pengetahuan mengalir melalui jalur yang relatif terkendali, yakni kurikulum, buku teks, dan guru, kini terdapat jalur paralel yang tidak diatur oleh struktur kurikulum. Dalam kerangka Zagzebski (2012), hal ini berarti terdapat pesaing baru yang meminta kepercayaan epistemik. Gejala ini tampak pula di Indonesia: Djakfar Musthafa (2024) menemukan bahwa rujukan otoritatif mahasiswa pendidikan bahasa Arab bergeser dari dosen dan buku yang dianggap berwibawa ke situs web yang dinilai andal, pendapat tokoh intelektual, dan jurnal terbitan perguruan tinggi seiring penggunaan AI dalam pembelajaran, dan Bond et al. (2024) mencatat pergeseran otoritas sebagai salah satu tantangan dalam tinjauan-tinjauan atas AI di pendidikan tinggi. Persoalannya, kepercayaan terhadap AI sering terbentuk bukan karena rekam jejak yang teruji, melainkan karena kefasihan jawabannya. Kefasihan bahasa mudah disalahartikan sebagai kebenaran, padahal sistem tersebut pada dasarnya menghasilkan teks berdasarkan pola statistik (Bender et al., 2021). Dengan demikian, pergeseran otoritas yang terjadi sebagian bersifat persepsional: siswa cenderung memberi kepercayaan pada sesuatu yang tampak tahu, bukan pada sesuatu yang terbukti benar.

Pergeseran ini juga menyentuh isi kurikulum. Sistem adaptif dan personalisasi menjadi aplikasi AI yang paling menonjol dalam literatur (Bond et al., 2024), sehingga jalur belajar, tingkat kesulitan materi, dan sumber rujukan dapat disesuaikan secara individual; di Indonesia, personalisasi belajar pun disebut sebagai salah satu alasan pemakaian ChatGPT pada era Kurikulum Merdeka (Supriyono et al., 2024). Hal ini memperluas ruang kemandirian siswa, tetapi sekaligus melemahkan fungsi kurikulum sebagai kerangka bersama yang menjamin kesetaraan capaian dan koherensi nilai. Kurikulum yang semula berfungsi sebagai pengesah pengetahuan berisiko berubah menjadi sekadar salah satu sumber di antara banyak sumber.

Opasitas, Bias, dan Ketidakadilan Epistemik

Sistem AI beroperasi sebagai kotak hitam yang proses dan data latihnya sulit ditelusuri, padahal otoritas epistemik yang sehat mensyaratkan adanya kemungkinan untuk mempertanggungjawabkan klaim (Zagzebski, 2012). Bender et al. (2021) memperingatkan bahwa data latih yang besar tidak menjamin keberagaman, karena sumber daring cenderung mewakili kelompok dan bahasa yang dominan. Crawford (2021) menambahkan bahwa AI dibangun di atas ekstraksi data, tenaga kerja, dan sumber daya yang timpang. Dari perspektif dekolonial, Zembylas (2023) menyoroti kolonialitas algoritmik dan neokolonialisme digital dalam pendidikan, dan Ricaurte (2022) menunjukkan bahwa tatanan pengetahuan algoritmik berpotensi mereproduksi hierarki kolonial, menyisihkan pengetahuan dan bahasa lokal.

Dalam kerangka Fricker (2007), kondisi ini dapat dibaca sebagai risiko ketidakadilan epistemik. Kay et al. (2024) memperluas gagasan tersebut ke AI generatif melalui konsep ketidakadilan epistemik algoritmik generatif, yang mencakup ketidakadilan testimonial yang diperkuat dan manipulatif, ketidaktahuan hermeneutik, serta ketidakadilan akses, terutama pada konteks multibahasa. Siswa dari komunitas dengan bahasa, budaya, atau pengetahuan lokal yang kurang terwakili dalam data latih dapat menerima jawaban yang menyingkirkan atau menyederhanakan pengalaman mereka. Bagi konteks Indonesia yang majemuk, termasuk pendidikan yang menekankan nilai keagamaan dan kearifan lokal, hal ini bukan persoalan sepele karena menyangkut keterwakilan pengetahuan yang dianggap sah dalam proses belajar. Selain itu, keluaran AI yang keliru namun meyakinkan dapat melemahkan kemampuan siswa menilai sumber, apalagi bila AI dipakai sebagai jalan pintas dan bukan sebagai bahan berpikir (Dwivedi et al., 2023; Kasneci et al., 2023). Tinjauan atas literatur di Indonesia pun mencatat keakuratan informasi serta etika akademik dan plagiarisme sebagai tantangan utama, di samping ketergantungan pada teknologi sebagai dampak negatif (Supriyono et al., 2024).

Penyebaran Otoritas yang Semu dan Konsentrasi Kuasa pada Platform

Secara permukaan, otoritas memang tersebar: siswa dapat mengakses banyak sumber, dan guru bukan lagi satu-satunya penjaga pengetahuan. Namun, literatur kritis menunjukkan bahwa penyebaran ini dapat menutupi konsentrasi kuasa baru. Williamson,

Macgilchrist, et al. (2023) menunjuk pada persoalan infrastruktur korporasi dan politik otomasi yang mengemuka sejak ChatGPT dirilis, sementara Williamson, Eynon, et al. (2023) menempatkan komersialisasi dan tata kelola sebagai isu inti dalam pembacaan kritis atas AI di pendidikan. Dalam pembacaan ini, data, algoritma, dan infrastruktur pendidikan digital berada di tangan segelintir aktor teknologi dan korporasi yang turut menentukan apa yang dihitung, dinilai, dan direkomendasikan sebagai pengetahuan. Selwyn (2022) mengingatkan bahwa teknologi pendidikan sering memuat agenda komersial dan teknokratis yang tidak selalu selaras dengan tujuan pendidikan.

Dalam bahasa Foucault (1980), kuasa tidak hilang ketika otoritas tampak menyebar, melainkan berpindah bentuk dan bekerja melalui mekanisme yang lebih halus. Kuasa atas pengetahuan tidak lagi hanya berada pada kurikulum nasional, tetapi juga pada desain model, kebijakan konten, dan arsitektur platform yang tidak terlibat dalam proses demokratis penyusunan kurikulum. Karena itu, istilah desentralisasi otoritas epistemik perlu digunakan secara hati-hati. Yang lebih akurat adalah bahwa otoritas mengalami fragmentasi di tingkat pengguna, sementara kendali infrastrukturnal cenderung terpusat. Temuan ini menjadi koreksi atas narasi demokratisasi pengetahuan yang kerap tidak diuji.

Pergeseran Peran Guru sebagai Penjamin Epistemik

Bond et al. (2024) mencatat kurangnya pengetahuan teknis guru sebagai salah satu tantangan dalam literatur dan menyerukan kolaborasi yang lebih kuat, termasuk dalam pengembangan aplikasi AI dan perancangan kurikulum AI, sebuah isyarat bahwa pendidik perlu dilibatkan dalam rancangan teknologi yang akan mereka gunakan. Biesta (2010) mengingatkan bahwa pendidikan tidak dapat direduksi menjadi transfer informasi dan capaian yang terukur, karena ia juga menyangkut kualifikasi, sosialisasi, dan subjektifikasi peserta didik. Argumen ini relevan: ketika fungsi penyampaian informasi dapat dilakukan AI, keunikan guru justru terletak pada fungsi yang tidak dapat diautomasi, yaitu menimbang kebenaran, memberi konteks nilai, dan membimbing penilaian siswa.

Dengan demikian, literatur mengarah pada pergeseran peran guru dari penyampai pengetahuan menjadi penjamin epistemik. Guru berfungsi memilih kapan AI layak dipakai, memverifikasi keluaran, memperlihatkan keterbatasan dan bias sistem, serta menghubungkan pengetahuan global dengan konteks lokal dan nilai-nilai pendidikan.

Prasyaratnya tidak ringan. Guru memerlukan literasi AI, ruang otonomi profesional, dan dukungan kebijakan agar tidak terjebak sebagai operator platform atau terbebani tuntutan administratif baru. Tanpa prasyarat itu, pergeseran peran justru dapat menjadi pelemahan profesi.

Otoritas Epistemik Terkurasi sebagai Kerangka Konseptual

Berdasarkan keempat temuan, artikel ini mengajukan kerangka otoritas epistemik terkurasi. Kerangka ini berangkat dari pandangan bahwa AI sebaiknya diperlakukan sebagai sumber yang dapat dikritisi, bukan sebagai pemegang otoritas final, dan bahwa kurikulum tidak seharusnya mempertahankan monopoli lama secara kaku. Kerangka ini memuat tiga prinsip. Pertama, akuntabilitas sumber: setiap klaim yang bersumber dari AI diposisikan sebagai hipotesis yang perlu diverifikasi terhadap sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kurasi pedagogis: guru dan sekolah menyeleksi, membingkai, dan mengontekstualisasi penggunaan AI sesuai tujuan kurikulum dan nilai pendidikan. Ketiga, kedaulatan kurikulum: pengembang kebijakan memastikan bahwa keputusan tentang pengetahuan apa yang diajarkan tetap berada dalam proses publik yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan diserahkan pada desain platform. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan seruan pada tata kelola AI yang berpusat pada manusia dan akuntabel (Holmes et al., 2022; Miao & Holmes, 2023), sekaligus memberi arah operasional bagi pengembangan kurikulum.

Keterbatasan kajian ini perlu dicatat. Sebagai tinjauan literatur, temuan bergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber yang dijangkau, dan sebagian besar literatur berasal dari konteks Global North sehingga transferabilitasnya ke Indonesia perlu diuji. Penelitian empiris lanjutan, misalnya studi kasus pada guru dan sekolah dengan latar kurikulum nasional, diperlukan untuk menguji kerangka yang diajukan

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Tinjauan literatur kritis ini menunjukkan bahwa AI memengaruhi otoritas pengetahuan dalam kurikulum sekolah dengan cara yang kompleks. AI menjadi sumber pengetahuan tambahan yang mengikis monopoli otoritas guru dan teks resmi, tetapi otoritas AI sendiri bermasalah karena opasitas, bias, dan risiko ketidakadilan epistemik. Penyebaran otoritas

yang tampak tidak serta-merta berarti desentralisasi, sebab kendali infrastruktur pengetahuan cenderung terkonsentrasi pada penyedia platform. Dalam situasi ini, guru berperan sebagai penjamin epistemik yang mengurasi, memverifikasi, dan mengontekstualisasi pengetahuan. Kerangka otoritas epistemik terkurasi diajukan sebagai arah bagi kurikulum yang tetap berdaulat secara pedagogis. Implikasinya, pembuat kebijakan perlu memperkuat literasi AI dan otonomi profesional guru serta memastikan keputusan kurikulum tidak tergeser oleh logika platform, sementara peneliti disarankan mengembangkan kajian empiris di konteks Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Apple, M. W. (2014). *Official knowledge: Democratic education in a conservative age* (3rd ed.). Routledge.
- Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610–623. <https://doi.org/10.1145/3442188.3445922>
- Biesta, G. (2010). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
- Bond, M., Khosravi, H., De Laat, M., Bergdahl, N., Negrea, V., Oxley, E., Pham, P., Chong, S. W., & Siemens, G. (2024). A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: A call for increased ethics, collaboration, and rigour. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, Article 4. <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00436-z>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence*. Yale University Press.
- Djakfar Musthafa, F. A. (2024). Penggunaan artificial intelligence (AI) dalam pembelajaran: Fenomena transformasi otoritas pengetahuan di kalangan mahasiswa. *Journal of Contemporary Islamic Education*, 4(1), 125–136. <https://doi.org/10.25217/jcie.v4i1.4386>
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., ... Wright, R. (2023). Opinion paper: "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71, 102642. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

- Fricker, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Buckingham Shum, S., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I., & Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in education: Towards a community-wide framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 504–526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>
- Kay, J., Kasirzadeh, A., & Mohamed, S. (2024). Epistemic injustice in generative AI. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 7(1), 684–697. <https://doi.org/10.1609/aies.v7i1.31671>
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO.
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., & Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers*. UNESCO.
- Ricaurte, P. (2022). Ethics for the majority world: AI and the question of violence at scale. *Media, Culture & Society*, 44(4), 726–745.
- Selwyn, N. (2022). The future of AI and education: Some cautionary notes. *European Journal of Education*, 57(4), 620–631. <https://doi.org/10.1111/ejed.12532>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Supriyono, A., Lesmono, A. D., & Prihandono, T. (2024). Dampak dan tantangan pemanfaatan ChatGPT dalam pembelajaran pada Kurikulum Merdeka: Tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 9(2), 134–152. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i2.5214>
- Williamson, B., Eynon, R., Knox, J., & Davies, H. C. (2023). Critical perspectives on AI in education: Political economy, discrimination, commercialization, governance

and ethics. In B. du Boulay, A. Mitrovic, & K. Yacef (Eds.), *Handbook of artificial intelligence in education* (pp. 555–573). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800375413.00037>

Williamson, B., Macgilchrist, F., & Potter, J. (2023). Re-examining AI, automation and datafication in education. *Learning, Media and Technology*, 48(1), 1–5.
<https://doi.org/10.1080/17439884.2023.2167830>

Zagzebski, L. T. (2012). *Epistemic authority: A theory of trust, authority, and autonomy in belief*. Oxford University Press.

Zembylas, M. (2023). A decolonial approach to AI in higher education teaching and learning: Strategies for undoing the ethics of digital neocolonialism. *Learning, Media and Technology*, 48(1), 25–37.
<https://doi.org/10.1080/17439884.2021.2010094>